

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wirausaha atau disebut dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki sumbangan dan peran strategis yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan dianggap sebagai mekanisme penting bagi pembanguana ekonomi (Prasetyo, 2016). Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pendorong dari perekonomian Indonesia. Dapat dibuktikan bahwa adanya UMKM di Indonesia mampu memberikan lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan menjadi salah satu sarana pengenalan produk buatan dalam negeri ke mancanegara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesinambungan antara perkembangan perekonomian Indonesia dengan UMKM yang terdapat di Indonesia (Abram, 2018).

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-EMKM maka standar ini di maksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Meningat kebijakan

akuntansi SAK-EMKM di beberapa aspek lebih ringan dari pada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-EMKM ini cukup ketat (Nurlaila, 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan usaha kecil yang dibentuk oleh masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seorang perorangan (Hidayah dan Nur, 2019). UMKM memiliki perkembangan yang cukup pesat di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali bermunculan UMKM dengan berbagai bidang usaha dan bahkan UMKM telah menjadi penyelamat dan penompang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2018) menunjukkan bahwa 99 % pangsa pasar didominasi oleh UMKM yang memberikan kontribusi lapangan kerja sebesar 97%. Ini tentu mampu memberikan pemasukan penerimaan pajak negara dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia (Wijaya, 2019). Untuk Sumatera Barat Sendiri, Sebagaimana yang dilansir dalam berita (Republika.co.id, 2019) bahwa Dinas Koperasi dan UMKM mencatat jumlah UMKM di Sumatera Barat saat ini mencapai 593.100. Salah satu upaya pemerintah yang dapat dilakukan adalah suatu pendampingan hingga pelatihan kepada UMKM sebagai tahap awal untuk mendorong pelaku UMKM lebih produktif. Dengan demikian, UMKM sebaiknya mendapat perhatian dalam perkembangannya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian Indonesia yang perlu mendapat perhatian, karena UMKM merupakan salah satu usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan di tengah – tengah persaingan mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang sangat sulit. Sektor UMKM memberikan dampak positif bagi kemandirian bangsa Indonesia. Pada dasarnya

UMKM mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kredit sebagai suntikan dana modal untuk mengatasi kendala permodalan yang ada. Hingga kini banyak program pembiayaan bagi UMKM yang dijalankan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak perbankan. Menurut Lutfita (2015) salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang terkait dengan pembiayaan UMKM adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan sebagai solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM. Rudiantoro dan Siregar (2015) juga menjelaskan bahwa salah satu teknik pemberian (KUR) yang banyak digunakan adalah *financial statement lending* yang mendasarkan pemberian kredit berdasarkan informasi keuangan dari debiturnya. Namun pada kenyataannya, hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi UMKM, sebab UMKM ternyata belum mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh bank. Pada saat ini banyak UMKM yang belum menyelenggarakan sistem akuntansi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Ni Putu (2017) menjelaskan bahwa pencatatan akuntansi yang dilakukan UMKM Pengrajin Endek Mastuli “Ayu Lestari” masih sangat sederhana, hanya sebatas mencatat penerimaan kas yang diperoleh dari pembayaran piutang secara tunai yang oleh pelanggan. Padahal penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh UMKM jika ingin mengembangkan usaha mereka.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) selaku penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. Menurut IAI (2016: xi) SAK EMKM adalah

entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang belum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. SAK EMKM juga dilengkapi dengan hal-hal yang bukan merupakan bagian dari SAK EMKM, yaitu Dasar Kesimpulan (DK) dan Contoh Ilustratif.

Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu harus ada pembenahan sistem dari dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus akan memudahkan dalam penerapan dan kenyataannya. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“Exposure Draft SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku efektif 1 Januari 2018. UMKM menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP yang sebelumnya menjadi dasar dalam menyusun Laporan Keuangan. UMKM merasa bahwa SAK ETAP masih terlalu rumit untuk dipelajari dan dijalankan (Narsa *et al.*, 2014). Berdasarkan permasalahan tersebut SAK EMKM diharapkan memberikan solusi bagi kendala yang dihadapi oleh UMKM. SAK EMKM jauh lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK EMKM memfasilitasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih komprehensif untuk memenuhi persyaratan pembiayaan lembaga keuangan dengan melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku (Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013). Keberadaan SAK EMKM yang lebih sederhana dibanding SAK ETAP sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memberikan solusi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih

sederhana sehingga mudah untuk mendapatkan akses pendanaan dari dunia perbankan. Pengelolaan UMKM dapat dilaksanakan dengan manajemen profesional

UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia namun di balik keunggulannya, UMKM masih memiliki beberapa kelemahan yang hingga kini masih harus diperbaiki. Kelemahan tersebut cukup bervariasi, namun disini yang memiliki dampak cukup signifikan dalam perkembangan UMKM salah satunya adalah Informasi Akuntansi yang ada pada UMKM. Informasi Akuntansi pada UMKM masih kurang diperhatikan oleh para pelaku UMKM (Hidayah dan Nur, 2019). Seringkali UMKM mengalami kesulitan dan hambatan untuk memajukan usaha diantaranya yaitu sulit untuk mencari modal yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Praktik akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2015). Kelemahan lainnya yaitu disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Salah satu penyebab rendahnya penggunaan akuntansi dalam perusahaan kecil ialah rendahnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan (Suhairi dkk, 2015). Salah seorang manajer klinik usaha kecil dan koperasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Idrus menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Maka dari itu diperlukan suatu bentuk laporan keuangan

berbasis yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dapat menggunakan standar pelaporan keuangan yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro , Kecil dan Menengah).

Menurut Kasmir (2015), Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Disamping itu, kita akan mengetahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba semata.

Menurut IAI (2016), Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro , Kecil dan Menengah atau lebih dikenal dengan SAK EMKM diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menyusun

laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini (iaiglobal.or.id). Ikatan Akuntan Indonesia (2016), menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk EMKM yaitu, SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah), standar ini terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini memudahkan entitas untuk menyusun laporan keuangan.

Alasan pergantian dari SAK ETAP menjadi SAK EMKM adalah mayoritas entitas, mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sulit mendapatkan akses untuk ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. Kondisi ini terjadi karena EMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar di industri keuangan. Sehingga untuk menambah pendanaan EMKM sangat kesulitan dan akhirnya tidak dapat melanjutkan usahanya (Nurlaila, 2018).

IAI (2016), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah merupakan standar yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari segi teknis, SAK EMKM murni menggunakan pengukuran biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehan. IAI menyatakan bahwa Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dijadikan acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kualitatif EMKM. Standar Akuntansi keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah mulai tanggal 1 Januari 2018, meskipun demikian boleh diterapkan sejak dini.

Hasil penelitian Alfitri dan Ngadiman (2014), dan Muchid (2015), menunjukkan bahwa banyak UKM belum menerapkan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Alasan UKM belum menerapkan SAK ETAP, karena keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman tentang akuntansi, dan kurangnya sumber daya manusia. Sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh UKM masih sangat sederhana. Dan masih belum banyak yang meneliti UKM menggunakan SAK EMKM.

Penyebab usaha UMKM kurang berkembang adalah banyaknya masalah dan hambatan yang dialami seperti permodalan, persaingan usaha, teknologi, pemasaran produk, sumber daya manusia dan keahlian manajemen termasuk cara pengelolaan keuangan dan akuntansi (Hidayah dan Nur, 2019). Akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih terbelah rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut dikarenakan rendahnya pendidikan pelaku UMKM, kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Beberapa pelaku UMKM belum melakukan pencatatan menurut kaidah akuntansi, sehingga menyulitkan mereka mendapatkan pinjaman dari pihak luar perusahaan seperti pemerintah, calon investor dan perbankan akibat tidak jelasnya sistem akuntansi mereka. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena harus memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa usahanya layak untuk diberi pinjaman dengan mewawancarai pelaku UMKM dan melihat langsung kondisi usahanya.

Toko Tuan Ngebul Vapehouse sudah melakukan kegiatan operasionalnya cukup lama, namun karena keterbatasan pemikiran mengenai pengelolaan

keuangan dan sumberdaya manusia yang kurang memadai dalam menyusun laporan keuangan secara benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga pemilik hanya melakukan pembuatan dan penyusunan laporan keuangannya secara konvensional seperti penjualan harian, penjualan bulanan dan laporan keuntungan. Hal ini lah yang menimbulkan keinginan peneliti untuk mencoba menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro , Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebaiknya mengikuti standard akuntansi yang ditetapkan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro , Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dapat membantu pemilik untuk memaksimalkan laba. Oleh karena itu, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu mensosialisasikan standar akuntansi ini agar pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mengalami kesulitan dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro , Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) (Studi Kasus Pada Toko Tuan Ngebul Vapehouse)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi yaitu :

1. Sulitnya mencari modal untuk mengembangkan usaha
2. Kurangnya perhatian para pelaku UMKM terhadap informasi akuntansi
3. Banyaknya masalah dan hambatan penyebab usaha UMKM kurang berkembang
4. Rendahnya Pendidikan pelaku UMKM
5. Kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan
6. Toko Tuan Ngebul Vapehouse hanya membuat laporan keuangan secara konvensional
7. Belum adanya sosialisasi mengenai bagaimana penerapan SAK EMKM

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah yaitu melakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Toko Tuan Ngebul Vapehouse Tahun 2018.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah ;

1. Bagaimanakah penyusunan laporan keuangan pada Toko Tuan Ngebul Vapehouse?
2. Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Toko Tuan Ngebul Vapehouse?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka peneliti memiliki tujuan :

1. Untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan pada Toko Tuan Ngebul Vapehouse
2. Untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Toko Tuan Ngebul Vapehouse

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan penulis dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) pada penyusunan laporan keuangan usaha kecil dan menengah (UKM)
2. Bagi Usaha yang diteliti
Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pemilik usaha khususnya dalam rangka

memaksimalkan laba usaha, bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) dapat membantu proses pembuatan laporan keuangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Akademis dapat menjadikan bahan pembelajaran dan informasi bagi para akademis tentang perlunya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) bagi para pemilik usaha kecil dan menengah (UKM).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian mengenai SAK EMKM dengan menambahkan variabel lain.